

# PENGELOLAAN POTENSI KELAPA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Oleh : **Hendri Setiawan**

*Hendri.sett13@gmail.com*

**Pembimbing : Sujianto**

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

## ***Abstract***

*Coconut management in Indragiri Hilir district is very important because it is an excellent potential that can improve the welfare of the community. Based on field observations there are some concerns regarding the potential utilization of the coconuts is not well by farmers, there is no regulation that focuses on managing coconut. The aim of the study is to examine the management of coconuts potential in manner downstream Indragiri Hilir district and any factors that hamper. The concept of the theory used is the Theory of Functions of Management, according to Henry Fayol in (Rohman, 2018). This research method using qualitative research method with case study approach. Data was collected by interview, observation and documentation. These results indicate the management of coconuts Potential in Indragiri Hilir conducted by the Department of Plantation Indragiri Hilir on coconuts are still not optimal because the potential of existing coconut fruit can't be utilized by the community into a derivative product that has a high economic value. Then the factors that become a obstacles are human resources that are not creative, yet there is no institutional focus on managing coconut management, Lack of budget and no district policy on management. The government of Indragiri Hilir should make a policy governing the management of coconut and make cooperation with coconut processing companies to empower smallholders in making coconut fruit derivative products.*

***Keywords : Management, Potential Of Coconut***

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan suatu kabupaten yang menjadikan perkebunan sebagai basis ekonominya. Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki luas perkebunan kelapa terbesar di Indonesia, sudah menjadi kewajiban pemerintahnya untuk dapat membuat aturan yang jelas terkait komoditi kelapa agar dapat menguntungkan semua pihak. Namun,

sampai saat ini belum ada regulasi atau kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur pengelolaan kelapa sebagai komoditi unggulan di Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini menjadi kelemahan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk melaksanakan pengelolaan komoditi kelapa dengan baik.

Kecamatan Enok yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir dengan mayoritas masyarakatnya bekerja

sebagai petani baik itu petani tanaman pangan, petani hortikultura maupun sebagai petani perkebunan. Kecamatan Enok yang beriklim tropis sehingga tanahnya cocok untuk dijadikan sebagai lahan pertanian salah satunya yaitu komoditi kelapa. Kebun kelapa yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan perkebunan terbesar di Indonesia dengan luas kebun 423.934 Ha, hampir 12% dari keseluruhan luas kebun kelapa di Indragiri Hilir berada di Kecamatan Enok yang luasnya 44.753 Ha.

Pengelolaan pasca panen kelapa sebagai komoditi unggulan Kecamatan Enok diharapkan mampu meningkatkan pembangunan daerah sehingga akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Namun kenyataannya masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya sehingga komoditi kelapa yang merupakan potensi belum termanfaatkan sepenuhnya. Pengelolaan serta pemanfaatan potensi buah kelapa pada Kecamatan Enok masih sangat minim.

Pada umumnya, para petani hanya memanfaatkan potensi buah kelapa di Kecamatan Enok dengan cara buah yang hanya dijual dalam bentuk kelapa bulat dan kopra atau hanya menjadi pemasok bahan baku perusahaan lokal, nasional dan internasional, serabut yang hanya dimanfaatkan untuk timbunan, batok yang dijadikan arang, sebagai bumbu dapur serta bahan membuat kue. Dengan jumlah produksi buah kelapa di Kecamatan Enok yang mencapai puluhan juta kilogram dapat merubah kondisi perekonomian masyarakatnya apabila dimanfaatkan menjadi berbagai bentuk produk turunan dari sebutir kelapa yang nilai ekonominya dapat mencapai sepuluh kali lipat dari pada dijual dalam bentuk kelapa bulat. Kurangnya pemanfaatan atau pengelolaan buah kelapa untuk dijadikan produk turunan yang memiliki nilai ekonomis karena tidak adanya industri atau kelompok usaha petani kelapa

yang memproduksi dan memanfaatkan kelapa serta minimnya pengetahuan dalam pengelolaan kelapa untuk membuat produk turunan dari seluruh bagian buah kelapa yang bernilai ekonomi tinggi sehingga berdampak terhadap ketergantungan petani akan harga penjualan kelapa bulat

Ada beberapa fenomena yang tidak sesuai harapan sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini antara lain:

1. Rendahnya kreatifitas dan etos kerja petani dalam pengelolaan kelapa yang hanya menjual kelapa bulat. Kebanyakan para petani kelapa di Kecamatan Enok hanya ingin sesuatu yang praktis yakni menjual kelapa dalam bentuk kelapa bulat saja, tidak memanfaatkan sebutir kelapa untuk dijadikan berbagai produk turunan yang bernilai ekonomi. Mereka berasumsi bahwa dengan menjual kelapa dalam bentuk kelapa bulat tidak memakan waktu lama.
2. Tidak ada kelembagaan khusus yang menangani komoditi kelapa sebagai komoditi unggulan Kabupaten Indragiri Hilir. Tidak adanya kelompok tani untuk pengelolaan kelapa pada sektor hilirnya. Petani kelapa di Kecamatan Enok hanya bekerja secara mandiri atau tidak ada kelompok petani kelapa atau kelompok usaha yang dibentuk oleh desa.
3. Belum ada regulasi atau kebijakan yang fokus dan tegas dalam mengatur pengelolaan potensi kelapa sebagai komoditi unggulan di Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Tidak adanya peralatan dan teknologi pendukung untuk memproduksi produk turunan kelapa untuk memproduksi turunan kelapa secara tradisional yang berkualitas agar dapat bersaing dengan produk turunan dari tanaman lain.
5. Tidak ada kerja sama yang dilakukan antara pemerintah dengan perusahaan kelapa untuk melibatkan atau memberdayakan petani kelapa dalam

membuat produk turunan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengelolaan Potensi Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apakah faktor yang menghambat dalam Pengelolaan Potensi Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Potensi Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam Pengelolaan Potensi Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Publik, serta menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir serta Dinas Perkebunan khususnya dalam rangka mengelola potensi sumber daya lokal yang ada dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
3. Bagi masyarakat, dapat sebagai informasi untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan potensi kelapa di Kecamatan Enok khususnya dan di Kabupaten Indragiri Hilir umumnya.

## 2. KONSEP TEORI

### 2.1 Pengelolaan

Istilah pengelolaan dalam bahasa Inggris adalah *management*. Selain berarti pengelolaan, *management* juga dapat berarti kepemimpinan, ketatalaksanaan, kepengurusan, pembinaan, penguasaan. Follet dalam (Suhardi, 2018) memandang bahwa manajemen sebagai *the art of getting things done through people* (seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain). Definisi ini mengandung arti bahwa untuk menyelesaikan suatu pekerjaan kita membutuhkan orang lain dan pelaksanaannya adalah suatu kemampuan atau keterampilan pribadi (seni) di dalamnya. Menurut Atmosudirjo dalam (Rohman, 2018) mengemukakan bahwa manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta (suatu yang harus dicapai) atau suatu tujuan kerja tertentu.

Menurut Hanafi dalam (Badrudin, 2017) mendefinisikan manajemen sebagai proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi. Menurut Tead dalam (Novitasari, 2017) manajemen merupakan sebuah proses dan perangkat yang mengarahkan dan membimbing kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan. Menurut Stoner dalam (Wijayanti, 2012) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Waldo dalam (Sukarna, 2011) *management is the action intended to achieve rational cooperation in an administrative system* (manajemen ialah tindakan yang ditujukan untuk memperoleh kerja sama yang rasionil dalam suatu sistem administrasi).

Menurut Sheldon dalam (Hayat, 2017)

menjelaskan bahwa manajemen mempunyai kegunaan sebagai fungsi kajian industri dalam pelaksanaan kebijakan, dipandang dalam batas-batas kumpulan penyelenggaraan dalam pekerjaan organisasi untuk tujuan khusus yang akan datang. Dalam bukunya (**Wilujeng, 2007**) manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur (mengelola). Dalam bukunya (**Hasibuan, 2017**) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Ilmu manajemen merupakan suatu pengumpulan pengetahuan yang sistematis, dikumpulkan dan diterima kebenarannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya metode ilmiah yang dapat digunakan dalam setiap penyelesaian masalah dalam manajemen. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien. Adapun fungsi-fungsi manajemen menurut **Fayol** dalam (**Rohman, 2018**) berikut diantaranya adalah (1) perencanaan (*planning*); (2) pengorganisasian (*organizing*); (3) pengarahan (*commanding*); (4) pengkoordinasian (*coordinating*); (5) pengawasan (*controlling*).

## 2.2 Potensi

Potensi adalah suatu kemampuan, kesanggupan, kekuatan ataupun daya yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar (**Majdi, 2007**). Sedangkan dalam bukunya (**Prihadhi, 2004**) potensi bisa disebut sebagai kekuatan, energi atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal. Pengotimalan ini dilakukan atau dilaksanakan melalui pekerjaan, usaha, dan pembangunan. Potensi ekonomi suatu

daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat menolong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.

Menurut Wiyono potensi memiliki arti kemampuan dasar dari seseorang yang masih terpendam dan menunggu untuk dimunculkan menjadi kekuatan yang nyata. Dari pendapat Wiyono tersebut potensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang masih terpendam dan siap untuk diwujudkan dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia itu sendiri (**Wiyono, 2006**). Sedangkan potensi sumber daya alam adalah segala macam bentuk potensi yang terdapat di bumi yang bisa berguna bagi kelangsungan hidup manusia serta penduduk sekitar (**Ma'mur, 2012**).

Pembentukan suatu daerah otonom salah satunya perlu mempertimbangkan kriteria potensi daerah. Setiap daerah memiliki berbagai potensi yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi upaya mempertahankan standar kesejahteraan yang telah dicapai warganya maupun dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan atau kehidupan pada taraf yang lebih baik. Potensi daerah dalam hal ini dapat berupa penduduk sebagai sumber tenaga kerja, potensi yang berupa sarana dan prasarana fisik, maupun potensi yang berupa kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Pemanfaatan seluruh potensi atau sumber daya tersebut dapat menciptakan berbagai peluang usaha yang kemudian dapat meningkatkan gerak laju perekonomian masyarakat secara berkelanjutan, yang pada gilirannya akan menimbulkan dampak ikutan (*multiplier effect*) yang luas pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Karena itu setiap daerah otonom harus mampu mengidentifikasi seluruh potensinya dalam upaya untuk mengembangkannya secara optimal, terarah dan terencana agar potensi tersebut dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah, sumber pendapatan daerah serta

peningkatan pendapatan masyarakat. Karena itu potensi-potensi yang dimiliki daerah akan dapat mengindikasikan apa yang menjadi kompetensi inti (*core competence*) daerah, yang kemudian perlu dikembangkan pada masa yang akan datang melalui berbagai upaya dan keterlibatan baik pmda, masyarakat maupun pelaku usaha di daerah.

Pemanfaatan seluruh potensi daerah akan membentuk suatu hubungan yang berupa jaringan kerja (*network*) yang saling tergantung satu sama lain. Potensi sumber daya alam hanya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh sumber daya manusia yang memiliki kualitas dengan menggunakan teknologi, sarana maupun prasarana yang tersedia dalam suatu institusi yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Untuk mencapai pemanfaatan seluruh sumber daya tersebut secara optimal maka diperlukan keseimbangan diantara ketiganya. Persoalan penting lainnya dalam upaya pengembangan potensi daerah adalah sejauhmana potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh masyarakat di daerah.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Kemudian untuk mengoptimalkan penelitian ini, peneliti menggunakan strategi penelitian *case study* (studi kasus). Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan beberapa pertimbangan: (1) menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, (2) metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan informen, (3) metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

#### 3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di

Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir yang mana Kecamatan Enok merupakan kecamatan kedua penghasil kelapa terbesar di Kabupaten Indragiri Hilir. Peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena pengelolaan kelapa di kecamatan tersebut belum mampu termaksimalkan dengan baik, maka dari itu peneliti ingin melihat seberapa jauh pengelolaan kelapa di Kecamatan Enok dapat di maksimalkan oleh petani kelapa itu sendiri beserta pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Ada beberapa instansi terkait sebagai lokasi penelitian peneliti yaitu Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, Kantor Kecamatan Enok, Kantor Desa Pengalihan Enok

#### 3.2 Informan Penelitian

Peneliti menggunakan metode *snowball sampling*. Pengumpulan data dari informan yang awalnya sedikit secara terus-menerus akan menjadi semakin banyak dan dihentikan setelah tidak ada data baru yang bisa didapatkan tentang Pengelolaan Potensi Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Berikut adalah daftar informan dalam penelitian ini adalah:

1. Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir
2. Kepala Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir
3. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Enok
4. Penyuluh Pertanian Kecamatan Enok
5. Kepala Desa Pengalihan Enok
6. Masyarakat atau petani kelapa di Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir

#### 3.3 Jenis Data

##### a. Data Primer

Data tersebut langsung diperoleh dari informan, data diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan penelitian yaitu Pengelolaan Potensi Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Data yang peneliti peroleh tersebut telah peneliti sajikan pada BAB V yaitu pembahasan dan hasil sebagai penunjang untuk penelitian

ini. Adapun data primer ini peneliti peroleh dari 7 (tujuh) informan yang langsung peneliti wawancarai secara langsung. Data juga diperoleh dari observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Adapun data primer tersebut berkaitan dengan:

1. Wawancara mendalam berkaitan Pengelolaan Potensi Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Wawancara mendalam tentang apakah faktor yang menghambat dalam Pengelolaan Potensi Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Data Sekunder

Banyak data yang peneliti peroleh secara tidak langsung dalam penelitian ini. Dalam bentuk petaturan peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Perkebunan dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perkebunan. Sedangkan data yang berbentuk hasil laporan dapat dilihat pada daftar table yang telah peneliti buat dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian Pengelolaan Potensi Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara tak berstruktur yang mana peneliti mengharapkan informasi yang lebih dalam dari informen sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh informen. Karena peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Enok maka wawancara yang peneliti lakukan dimulai dengan mewawancarai Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, Drs. H. Zainal Abidin pada

tanggal 27 Maret 2019 pukul 10.00 WIB. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Pengalihan Enok, Bapak Buhari pada pukul 14.00 WIB. Peneliti juga melakukan wawancara dengan petani kelapa di Kecamatan Enok pada pukul 15.00 WIB. Peneliti selanjutnya melakukan wawancara pada instansi terkait dalam Pengelolaan Potensi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu dengan Kepala Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, Aswin Bovita, SP, M.Si pada tanggal 3 April 2019 pukul 09.00 WIB. Pada tanggal 4 April 2019 peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Sutarno Wandoyo, S.Sos, MH tepatnya pukul 10.00 WIB.

Untuk menyempurnakan penelitian ini maka peneliti melakukan wawancara kembali dengan para petani kelapa di Kecamatan Enok pada tanggal 6 April 2019, peneliti juga melakukan wawancara dengan penyuluh pertanian di Kecamatan Enok. Selain itu peneliti juga mengajukan berbagai pertanyaan yang lebih terarah pada suatu tujuan. Wawancara ini dilakukan kepada informan-informan yang berkaitan dengan penelitian ini, baik secara struktur maupun wawancara bebas. Peneliti mengadakan wawancara mendalam terhadap informan guna memperoleh data dan memahami Pengelolaan Potensi Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Observasi

Yaitu Pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap realita yang terjadi pada objek yang kita teliti, istilah sederhananya adalah proses peneliti dalam melihat situasi penelitian. Teknik ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilir. Observasi yang peneliti lakukan dalam kegiatan ini saat menghadiri seminar nasional pengembangan potensi ekonomi lokal produk unggulan daerah Kabupaten Indragiri Hilir, kegiatan ini

dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2019.

#### c. Dokumentasi

Hal ini berkaitan dengan Pengelolaan Potensi Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir yang mana berguna untuk mencari data sekunder untuk data primer. Dokumentasi yakni teknik yang dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti. Adapun untuk dokumentasi peneliti sajikan pada lampiran yang peneliti dapatkan pada saat penelitian ini berlangsung.

### 3.5 Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini yaitu analisis data dengan pendekatan linear dan hierarki mengenai analisis data dalam penelitian kualitatif, sebagai berikut:

Pertama, tahap pertama yang peneliti lakukan adalah mempersiapkan data untuk dianalisis, dengan cara memilah, men-scening hasil transkrip wawancara dengan informan-informan penelitian. Yang kemudian peneliti lakukan dengan mencatat dan menyusun data ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Tahap pertama ini peneliti lakukan setelah keseluruhan wawancara selesai dilakukan.

Kedua, tahap selanjutnya peneliti membaca keseluruhan data untuk membangun informasi yang diperoleh tentang Pengelolaan Potensi Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir dari hasil transkrip wawancara dengan menentukan gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan informan penelitian, bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut dan bagaimana kesan dari kedalaman penuturan informasi tersebut.

Ketiga, setelah itu peneliti lakukan dengan meng-coding data yaitu proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Pada tahap ini peneliti mengambil data tulisan atau gambar yang

telah dikumpulkan selama proses pengumpulan saat penelitian berlangsung. Data tulisan tersebut berupa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perkebunan.

Keempat, tahap selanjutnya peneliti menghubungkan hasil wawancara dengan teori yang digunakan yaitu teori fungsi manajemen untuk dijadikan suatu rangkaian cerita dalam narasi atau laporan kualitatif.

Kelima, tahap terakhir peneliti memaknai data dengan membandingkan antara hasil penelitian dengan informasi yang didapatkan oleh peneliti dari setiap informan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Pengelolaan Potensi Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan kabupaten dengan potensi sumber daya alam yang sangat menjanjikan sebab memiliki perkebunan kelapa terluas di Indonesia. Dengan potensi sumber daya lokal kelapa yang ada saat ini sangat menjanjikan, membuat Kabupaten Indragiri Hilir harus meningkatkan pengelolaan potensi kelapa secara lebih terstruktur dan terpadu. Pengelolaan Potensi Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir jika terlaksana dengan baik maka akan menghasilkan manfaat yang sangat besar bagi daerah mengingat bidang perkebunan kelapa menjadi bidang yang sangat diperhatikan di Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat dilihat dari misi Kabupaten Indragiri Hilir yang diantaranya berbunyi "Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat". Maka untuk mewujudkan misi tersebut pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memasukan pengelolaan kelapa kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023.

Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan potensi kelapa yang kini dilaksanakan tersebut penulis meneliti dengan menggunakan teori Henry Fayol yang menjadi

indikator-indikator sebagai berikut: *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Commanding* (Pengarahan), *Coordinating* (Pengorganisasian) dan *Controlling* (Pengawasan). Penulis akan menjelaskan masing-masing indikator tersebut berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan lebih jelas seperti yang tercantum di bawah ini:

#### **4.1.1 *Planning* (Perencanaan)**

*Planning* atau perencanaan yang dimaksudkan sebagai pemilihan sekumpulan kegiatan dalam keputusan tentang apa selanjutnya yang akan dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Suatu perencanaan disusun untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau setidaknya mampu mendekati batasan keinginan yang akan dirumuskan dalam rencana. Perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Pengelolaan Potensi Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir menginginkan agar potensi kelapa di Indragiri Hilir dapat dimanfaatkan menjadi beragam produk turunan yang dapat dijual dan bernilai ekonomi sehingga membantu perekonomian masyarakat dan menambah pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Perencanaan dibutuhkan untuk menetapkan tujuan organisasi secara keseluruhan. Pembentukan tujuan adalah suatu kegiatan untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Perkebunan telah membuat tujuan dari pengelolaan kelapa dengan memasukan pengelolaan kelapa kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023. Memasukan pengelolaan kelapa kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengharapkan agar potensi komoditi kelapa di Kabupaten

Indragiri Hilir dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan menjadikan masyarakat sejahtera.

Selain dari penetapan tujuan, tahapan perencanaan juga berfungsi untuk menetapkan sasaran dari perencanaan yang dibuat. Pada pengelolaan kelapa, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan menjadi sasaran utama. Merubah pola pikir, meningkatkan kreatifitas serta etos kerja masyarakat untuk lebih kreatif dalam mengelola buah kelapa menjadi sasaran tindakan yang akan merubah kesejahteraan masyarakat petani kelapa.

Setelah penetapan tujuan dan sasaran dalam perencanaan harus dibarengi kebijakan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu program, kegiatan dan cara bertindak. Jika dilihat dari regulasi atau kebijakan peraturan daerah yang mengatur, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang mengatur tentang pengelolaan komoditi kelapa belum ada dirumuskan, hanya terdapat Peraturan Daerah Provinsi Riau Tentang Penyelenggaraan Perkebunan dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang mengatur tentang tata niaga kelapa. Belum adanya kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam bentuk perda ataupun perbup yang mengatur secara tegas tentang pengelolaan komoditi kelapa sebagai komoditi unggulan di Kabupaten Indragiri Hilir menjadi kelemahan dalam melaksanakan pengelolaan kelapa yang lebih baik.

#### **4.1.2 *Organizing* (Pengorganisasian)**

Setelah melakukan perencanaan sebagai fungsi manajemen yang pertama, tentunya harus melakukan fungsi manajemen yang lainnya. Salah satu fungsi lain manajemen adalah mengetahui pengorganisasian yang merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting karena dengan pengorganisasian berarti akan memadukan seluruh sumber-sumber yang ada dalam organisasi, baik yang berupa sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya ke arah tercapainya suatu tujuan. Pengorganisasian

adalah fungsi untuk mengelompokkan pekerjaan. Dengan pengorganisasian diharapkan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir agar secara terus menerus menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam suatu organisasi yang disini adalah dibutuhkan suatu pembagian kerja, diharapkan dengan adanya pembagian kerja tersebut akan dapat menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan tidak adanya tumpang tindih wewenang. Hal ini dilakukan karena pekerjaan dibagi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas dan fungsi sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab mengenai permasalahan perkebunan salah satunya komoditi kelapa.

Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir juga memiliki petugas lapangan yang bekerja sebagai pendamping atau memberi pengetahuan tentang bagaimana tata cara pengelolaan dan pemanfaatan kelapa yang baik. Selain itu masyarakat juga memiliki fungsi yang penting dalam pelaksanaan pengelolaan kelapa sebagai pelaksana.

Selain melakukan pembagian kerja dengan tugas dan fungsinya, kemampuan para pegawai sangat menentukan tercapai atau tidaknya tujuan yang telah ditentukan. Tujuan akan tercapai apabila pegawai dalam sebuah organisasi tersebut memiliki kemampuan yang lebih dan sesuai dengan posisi jabatannya. Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir terdapat beberapa pegawai menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan kemampuan. Hal itu dibuktikan dengan jabatan penyuluh yang tugasnya sebagai pembimbing para petani agar dapat mengelola kelapa dengan maksimal diisi oleh pegawai tamatan SMA. Hal itu dapat menjadi faktor yang mengganggu untuk tercapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan dan mengganggu jalannya kinerja pegawai

karena pengalaman dan pendidikan yang tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Selain tugas dan fungsi serta kemampuan pegawai di dalam sebuah organisasi, setiap elemen atau pegawai memiliki suatu tanggung jawab yang harus diterima dan dilaksanakan. Untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab dari Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir di setiap kecamatan, maka dibentuklah tim penyuluh ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Namun, petani kelapa di Kecamatan Enok mengatakan bahwa penyuluh tidak memberikan sosialisasi atau arahan tentang tata cara pengelolaan kelapa yang baik.

#### **4.1.3 *Commanding* (Pengarahan)**

Fungsi *commanding* ini adalah bagaimana seorang pemimpin dalam sebuah organisasi harus memiliki kemampuan dalam memotivasi, membimbing, mengarahkan dan memberikan perintah kepada bawahannya. Pengarahan dalam Pengelolaan Potensi Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir meliputi pemberian bimbingan, saran ataupun perintah dan juga sosialisasi dari pimpinan kepada segala perangkat atau dari pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir kepada petani kelapa untuk mengatur dan menjalankan segala kegiatan dan tugas yang berkaitan dengan Pengelolaan Potensi Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilir.

Bimbingan dalam Pengelolaan Potensi Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir dimaksudkan agar pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir lebih terarah dalam bekerja sehingga dibutuhkan bimbingan yang membangun kinerja. Kepala Dinas dan Sekretaris yang mewakili senantiasa memberikan bimbingan berupa arahan dan motivasi kepada bawahannya yaitu pegawai yang ada di Dinas Perkebunan dan juga penyuluh untuk bekerja lebih giat dan serius bekerja dalam pengelolaan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir yang mana merupakan salah satu

program yang digalakan oleh Bupati Indragiri Hilir pada periode keduanya.

Selanjutnya pengarahan berupa saran. Saran yang dimaksud bertujuan demi meningkatkan Pengelolaan Potensi Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir yang lebih baik. Internal Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir terbuka satu sama lain dan juga Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir terbuka dengan pihak luar dalam menerima saran yang membangun dalam pengelolaan kelapa. Ada keterbukaan antara atasan dan bawahan untuk memberikan ataupun menerima saran yang diberikan untuk senantiasa memajukan pengelolaan kelapa di Indragiri Hilir. Berikutnya perintah yaitu suatu instruksi resmi dari seorang atasan yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir antara lain Bupati serta Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir kepada bawahan untuk mengerjakan atau untuk tidak melakukan sesuatu. Suatu perintah adalah bentuk resmi baik lisan maupun tulisan telah dibatasi bahwa pimpinan adalah orang yang mendapatkan hasil dari bawahannya.

Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk melakukan pengarahan. Sosialisasi sendiri adalah proses belajar untuk bertingkah laku berdasarkan batasan-batasan yang telah ada melalui proses pembelajaran. Sosialisasi tentang pengelolaan kelapa yang baik dari Dinas Perkebunan kepada petani kelapa atau masyarakat di Kecamatan Enok belum ada dilaksanakan sosialisasi tentang tata cara pengelolaan kelapa dengan baik yang bisa memanfaatkan kelapa menjadi sebuah produk turunan yang bernilai ekonomi. Oleh karena itu peran Dinas Perkebunan disini dirasa belum maksimal seharusnya pemerintah melaksanakan sosialisasi dengan tepat sasaran supaya pengelolaan kelapa di Kecamatan Enok tersebut bisa menjadi produk yang menghasilkan banyak produk turunan yang menambah penghasilan bagi masyarakat.

Melalui berbagai bimbingan, saran,

dan perintah sudah berjalan baik didalam internal instansi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir akan tetapi dalam melaksanakan poin sosialisasi yang dilakukan oleh dinas tersebut kepada pihak eksternal atau petani kelapa di Kecamatan Enok masih tidak berjalan secara baik. Maka dari itu diharapkan upaya yang maksimal oleh Dinas Perkebunan untuk meningkatkan pengelolaan kelapa yang dapat menghasilkan produk turunan yang bernilai ekonomi.

#### **4.1.4 Coordinating (Pengkoordinasian)**

*Coordinating* atau pengkoordinasian merupakan berbagai upaya atau tindakan yang dilakukan seorang pemimpin untuk menghindari terjadinya kekacauan, perkecokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan tugas-tugas dan pekerjaan bawahan dalam mencapai suatu tujuan bersama yang telah ditentukan. Indikator koordinasi antara lain pembagian kerja, disiplin, komunikasi, kesatuan tindakan.

Pembagian kerja merupakan pemecahan tugas sedemikian rupa agar orang yang bertugas bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka lakukan dalam rangka untuk mempermudah melaksanakan pekerjaan, menjalankan tugas dan fungsi supaya tercapai tujuan organisasi. Maka demi mempermudah kerja pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kecamatan Enok, serta instansi lainnya dan juga petani kelapa di Kecamatan Enok dilakukanlah pembagian kerja. Pembagian kerja diatur dalam tupoksinya berdasarkan arahan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir bersama dengan Pemerintah Kecamatan Enok dalam melakukan pembagian tugas untuk Pengelolaan Potensi Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, namun tidak membatasi kinerja bahkan saling memberikan informasi sehingga membantu mempermudah dalam pelaksanaan pembagian kerja antar masing-masing instansi.

Disiplin merupakan penunjang

keberhasilan kinerja dalam suatu organisasi. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawab. Disiplin mempunyai efek kepatuhan seseorang terhadap aturan atau hukum dan tunduk terhadap pengawasan atau pengendalian. Agar tujuan yang diinginkan mudah untuk dicapai dan lebih efisien maka sangat dibutuhkan kedisiplinan setiap pihak untuk melaksanakan Pengelolaan Potensi Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Namun, kedisiplinan dari penyuluh pertanian masih kurang dikarenakan mereka hanya melaksanakan tugas seperti sosialisasi jika ada bantuan datang, dan jika tidak ada bantuan sosialisasi tersebut tidak dilakukan.

Komunikasi merupakan pemindahan informasi dari satu instansi ke instansi lainnya atau individu ke individu lainnya. Dalam sebuah koordinasi terdapat hubungan komunikasi baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi penting dari instansi-instansi yang bekerjasama agar terjadinya koordinasi yang baik demi tercapainya tujuan bersama. Informasi-informasi yang diperoleh diharapkan menjadi langkah yang baik untuk mempermudah pelaksanaan koordinasi guna berlangsungnya Pengelolaan Potensi Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Komunikasi antara Dinas Perkebunan dengan masyarakat melalui penyuluh itu masih kurang. Penyuluh yang bertugas untuk membina tidak menjalankan dengan sepenuhnya sehingga informasi atau arahan dari Dinas Perkebunan kepada masyarakat tidak tersampaikan dengan baik, begitu juga sebaliknya.

Kesatuan tindakan adalah keselarasan tindakan yang diatur oleh pemimpin untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya kesatuan tindakan maka tujuan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Perkebunan Kabupaten

Indragiri Hilir dalam Pengelolaan Potensi Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir tidak akan mungkin tercapai, maka dari itu diperlukan kesatuan tindakan antara pihak-pihak yang bekerja sama. Dalam melaksanakan sebuah tindakan perlu adanya kerjasama yang saling pengertian antar instansi yang bekerja sama dalam Pengelolaan Potensi Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Belum ada kerja sama antara pihak pemerintah dengan perusahaan pengolah kelapa dalam memberdayakan petani kelapa untuk dapat membuat produk turunan dari buah kelapa yang bernilai ekonomi tinggi.

#### **4.1.5 Controlling (Pengawasan)**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, sehingga berbagai ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang apa saja fungsi-fungsi manajemen selalu menempatkan kegiatan pengawasan sebagai salah satu kegiatan yang sangat penting dalam manajemen. Begitu pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi, sehingga keberhasilan atau kinerja organisasi menjadi tolak ukur sampai dimana kegiatan pengawasan terhadap organisasi tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan kelapa di Kecamatan Enok mengalami keterbatasan karena tidak ada badan khusus yang dibentuk oleh Dinas Perkebunan untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan kelapa secara berkelanjutan di Kecamatan Enok ataupun kecamatan lainnya, pengawasan hanya dilakukan melalui para penyuluh yang disebar kesetiap kecamatan.

Dalam melaksanakan pengawasan maka harus ada standar yang harus ditetapkan sehingga dapat menilai pengelolaan yang menyimpang yang terjadi di lapangan. standar atau tolak ukur keberhasilan dari pengelolaan potensi buah kelapa yaitu jika masyarakat telah mampu memanfaatkan sebutir buah kelapa menjadi berbagai macam bentuk olahan produk turunan yang bernilai ekonomi. Sedangkan untuk

standar atau alat ukur yang kuat dan tegas secara tertulis dalam pengawasan Pengelolaan Potensi Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir belum ada. Secara umum pemerintah masih mengacu pada Undang-Undang No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perkebunan.

Lebih lanjut mengenai pengawasan dalam pengelolaan kelapa secara berkelanjutan yaitu mengukur hasil kerja atau pengukuran kegiatan yang telah dilakukan. Melakukan pengukuran hasil kerja atau kegiatan yang dilakukan dengancara observasi yang dilakukan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir atau dengan laporan secara lisan maupun secara tertulis yang diterima. Begitu juga hal yang dilakukan dalam pengawasan pengelolaan kelapa di Kecamatan Enok oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Setelah melakukan pengukuran hasil kerja atau kegiatan, selanjutnya dalam pengawasan dilakukan kegiatan membandingkan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan-penyimpangan (*deviasi*). Dalam melakukan Pengelolaan Potensi Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, Dinas Perkebunan juga melakukan perbandingan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan untuk melihat apakah kegiatan yang dilakukan berhasil atau terjadi penyimpangan dengan melakukan evaluasi pada internal Dinas Perkebunan juga dengan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir beserta instansi lain yang terkait dalam pengelolaan potensi kelapa.

Proses akhir dalam fungsi manajemen pengawasan yaitu melakukan perbaikan. Kegiatan ini dilakukan apabila terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian yang terjadi dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dinas Perkebunan

Kabupaten Indragiri Hilir melakukan perbaikan pada setiap kegagalan atau kekurangan-kekurangan yang terjadi ketika melaksanakan pengelolaan komoditi kelapa. Terjadinya kegagalan dan kekurangan dalam melaksanakan pengelolaan komoditi kelapa pada rencana sebelumnya, Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir menjadikannya acuan untuk perbaikan pada masa mendatang.

## **5.2 Faktor-Faktor Yang Menghambat Pengelolaan Potensi Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir**

### **5.2.1 Sumber Daya Manusia**

Daya kreatifitas dari sumber daya manusia yang rendah dalam Pengelolaan Potensi Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya pada Kecamatan Enok disebabkan kurangnya pengetahuan petani yang dibuktikan bahwa petani rata-rata hanya tamatan SMP dan SMA dan pelaksanaan penyuluhan yang dijalankan oleh penyuluh kurang intensif menyebabkan tidak maksimalnya pemanfaatan buah kelapa menjadi hasil dari turunan yang memiliki nilai ekonomi. Kualitas sumber daya manusia memang sangat penting, karena sumber daya manusia merupakan penggerak utama dalam berjalannya suatu kegiatan.

### **5.2.2 Kelembagaan**

Pengelolaan kelapa pada Kecamatan Enok selama ini masih dilakukan oleh Dinas Perkebunan melalui para penyuluh pertanian. Tidak adanya lembaga khusus yang menangani tentang kelapa sehingga komoditi kelapa sebaga komoditi unggulan dari Kecamatan Enok dan Kabupaten Indragiri Hilir tidak terkelola dengan baik. Jika dilihat dari potensinya, komoditi kelapa jelas mempunyai potensi yang besar dalam meningkatkan pembangunan Kecamatan Enok dan Kabupaten Indragiri Hilir terutama dalam pembangunan ekonomi.

### **5.2.3 Anggaran**

Anggaran sangat menentukan keberhasilan dari kegiatan manajemen yang

dilakukan. Dalam pengelolaan kelapa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir harus merencanakan pengadaan seperti salah satunya teknologi tepat guna yang dapat membantu para petani untuk memproduksi kelapa secara mandiri, semua itu membutuhkan anggaran. Minimnya anggaran inilah yang membuat permasalahan pengelolaan potensi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir terus terjadi.

#### 5.2.4 Kebijakan

Selain faktor-faktor di atas, kebijakan atau regulasi yang tegas sangat berpengaruh terhadap kesuksesan dalam pelaksanaan pengelolaan potensi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir belum merumuskan kebijakan yang fokus dan tegas untuk mengurus pengelolaan potensi kelapa sebagai komoditi unggulan.

## 6. PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Pengelolaan Potensi Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir dengan menggunakan teori Henry Fayol, yang menetapkan lima indikator fungsi-fungsi manajemen yakni *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *commanding* (pengarahan), *coordinating* (pengkoordinasian) dan *controlling* (pengawasan) maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan potensi kelapa yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap komoditi kelapa masih belum optimal. Karena jika dilihat dari indikator fungsi manajemen yaitu *planning*, *organizing*, *commanding*, *coordinating* dan *controlling* masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Faktanya dilapangan, dari tahun ke tahun petani kelapa di Kecamatan Enok masih sebagai pemasok bahan baku untuk

perusahaan atau dominan menjual kelapa dalam bentuk kelapa bulat, mereka belum mampu memanfaatkan sebutir buah kelapa yang sebenarnya dapat dijadikan berbagai produk turunan yang bernilai ekonomi tinggi. Tidak ada upaya kerja sama yang dilakukan antara pihak pemerintah dengan perusahaan pengolah kelapa untuk memberdayakan petani kelapa dalam membuat produk turunan. Namun, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mencoba memperbaiki dan menggiatkan dalam pengelolaan kelapa dengan membuat program DMIJ Plus Terintegrasi yang masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023.

2. Adapun faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan Potensi Kelapa di Kabupaten Indragiri belum optimal disebabkan beberapa faktor yaitu sumber daya manusianya yang disini adalah petani kelapa di Kecamatan Enok yang pola pikirnya masih pragmatis dan rendahnya daya kreatifitas membuat mereka ketergantungan akan harga jual kelapa bulat. Para petani belum dapat memaksimalkan sebutir buah kelapa menjadi berbagai olahan produk turunan yang bernilai ekonomi tinggi. Belum adanya kelembagaan dan kebijakan yang fokus serta tegas dalam mengatur dan menjalankan pengelolaan potensi kelapa menjadi kelemahan untuk dapat melaksanakan pengelolaan kelapa yang optimal. Tidak hanya itu, minimnya anggaran yang juga berdampak terhadap sarana dan prasarana pengelolaan kelapa pada Kecamatan Enok menjadi tidak memadai.

### 6.1 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, penulis memberikan saran atau masukan-masukan sebagai berikut:

1. Agar Kabupaten Indragiri Hilir dapat mewujudkan Pengelolaan Potensi Kelapa di

Kabupaten Indragiri Hilir yang optimal maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir harus membuat kerja sama dengan perusahaan pengolah kelapa yang melibatkan atau memberdayakan para petani kelapa untuk membuat produk turunan dari buah kelapa yang bernilai ekonomi tinggi.

2. Agar Kabupaten Indragiri Hilir dapat mewujudkan Pengelolaan Potensi Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir yang optimal maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir harus lebih giat dalam membina petani kelapa agar merubah pola pikir yang pragmatis serta membentuk kelembagaan yang khusus dan membuat kebijakan yang tegas untuk mengatur pelaksanaan pengelolaan kelapa agar berjalan maksimal. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga harus membuat anggaran khusus untuk pengelolaan kelapa yang merupakan komoditi unggulan di Kabupaten Indragiri Hilir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Badrudin. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Cresswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (4<sup>th</sup> ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasibuan, M. S. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (21st ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kriyantono, R. (2014). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ma'mur, A. J. (2012). *Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal*. Yogyakarta: Diva Press.
- Manulang. (2012). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Majdi, U. Y. E. (2007). *Quranic Quotient*. Jakarta: Qultum Media.
- Mitchell, B., Setiawan, B., & Rahmi, dwita hadi. (2010). *pengelolaan sumber daya dan lingkungan* (IV). yogyakarta: gadjah mada university press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Novitasari, E. (2017). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Quadrant.
- Prihadhi, E. K. (2004). *My Potensi*. Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Rohman, A. (2018). *Dasar-Dasar Manajemen Publik*. Malang: Empatdua Kelompok Intrans Publishing.
- Suhardi. (2018). *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya*. (Anis Eliyana, Ed.). Yogyakarta: Gava Media.
- Sukarna. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen*. (Team Mandar Maju, Ed.) (II). Bandung: Mandar Maju.
- Terry, G. R. (2016). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wijayanti, I. D. S. (2012). *Manajemen*. (Ari Setiawan, Ed.). Yogyakarta.
- Wilujeng, S. (2007). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wiyono, S. (2006). *Managemen Potensi Diri*. Jakarta: PT Grasindo.
- Yahya, Y. (2006). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

## Dokumen:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perkebunan
- Luas Areal Produksi dan Jumlah Petani Pemilik Tanaman Tahunan Perkebunan Rakyat Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

## Penelitian Terdahulu:

- Aris, A., Juanda, B., Fauzi, A., & Hakim, B. (2016). Kabupaten Indragiri Hilir Impacts of Community ' s Coconut Farm Development on Poverty and Regional Economy of Indragiri Hilir Regency. *Jurnal Agro Ekonomi*, 28(1), 69–94.
- Astitik, F., & Dewi, R. M. (2018). Upaya Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Melalui Home Industry Gambir ( Krupuk Kertas ) Di Dusun Dunengendak Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 1–17.
- Odorlina Pilianna Situmorang, R., & H Harianja, A. (2018). People'S Preference in Managing Sago in Asahan District, and Its Influencing Factors. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 15(2), 129–147. <https://doi.org/10.20886/jpsek.2018.15.2.129-147>
- Rahman, N. (2016). Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015. *Skripsi*. 44.
- Sabriyah, H., & Kospa, D. (2016). Konsep Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. *Jurnal Tekno Global*, 5(1), 1–10.
- Saputra, R. (2017). Pengembangan Sumber Daya Lokal Di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus: Pengelolaan Gambir Di Kecamatan Pangkalan Koto Baru). *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, 4(2), 1–13.

## Website:

<https://inhilkab.bps.go.id/statictable/2016/01/13/68/nama-kecamatan-dan-ibukota-kecamatan-di-kabupaten-indragiri-hilir-2014.html>

kecamatan-di-kabupaten-indragiri-hilir-2014.html diakses pada tanggal 18 Maret 2019 pukul 01.00 WIB